

Laporan Keuangan Semester II 2021

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pandeglang, 8 Januari 2022  
Sekretaris  
  
Dina Kurnia Sari Utami  
NIP. 086607192009022008



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	8
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	11
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	13
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	15
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	17
VI. Lampiran dan Daftar	



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

Alamat : Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa  
Jl. Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang – Kabupaten Pandeglang  
Telp/fax. (0253) 205131, email : kpupandeglang@yahoo.com website : www.kpu-pandeglangkab.go.id

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pandeglang, 8 Januari 2022

  
Dina Kurnia Sari Utami  
NIP. 198607192009022008

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. Laporan Keuangan ini meliputi :

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp219.565.696 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp219.565.696 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.185.964.573 atau mencapai 99,61 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.213.771.000.

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.441.029.345 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.441.029.345 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.441.029.345

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.808 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.694.696.673 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-7.694.688.865, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp292.456.460 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.402.232.405.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp8.521.317.460, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-7.402.232.405 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -2.423.769.787 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.745.714.077 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.441.029.345

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	219.565.696	-	290.973.258
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>219.565.696</b>	<b>-</b>	<b>290.973.258</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.225.471.000	2.208.198.123	99,22	2.069.633.850
Belanja Barang	B.2.2	4.988.300.000	4.977.766.450	99,79	75.637.023.895
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	58.800.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.213.771.000</b>	<b>7.185.964.573</b>	<b>99,61</b>	<b>77.765.457.745</b>

**II. LAPORAN OPERASIONAL****LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	7.808	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>7.808</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	2.208.186.123	2.069.633.850
Beban Persediaan	D.4	113.658.850	2.967.645.395
Beban Barang dan Jasa	D.5	4.432.847.400	70.042.775.500
Beban Pemeliharaan	D.6	102.725.350	97.028.500
Beban Perjalanan Dinas	D.7	328.534.850	2.529.574.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	508.732.100	467.274.650
<b>Jumlah Beban</b>		<b>7.694.686.673</b>	<b>78.173.932.395</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(7.694.688.865)</b>	<b>(78.173.932.395)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	138.138.888	276.575.758
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.10	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	154.317.572	14.397.500
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>292.456.460</b>	<b>290.973.258</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(7.402.232.405)</b>	<b>(77.882.959.137)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.12		
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(7.402.232.405)</b>	<b>(77.882.959.137)</b>

### III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	8.521.317.460	2.791.894.555
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(7.402.232.405)	(77.882.959.137)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(2.423.769.787)	(27.504.687)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	(27.504.687)
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	(2.423.769.787)	-
Jumlah		(2.423.769.787)	(27.504.687)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.745.714.077	83.639.886.729
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(7.080.288.115)	5.729.422.905
EKUITAS AKHIR	E.6	1.441.029.345	8.521.317.460



**IV. NERACA**

**NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	6.644.454.587
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	-	-
Persediaan	C.4	-	259.345.828
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>-</b>	<b>6.903.800.415</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.5	3.918.547.440	3.586.303.040
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(2.477.518.095)	(1.968.785.995)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.441.029.345</b>	<b>1.617.517.045</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	C.7	162.052.700	162.052.700
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(162.052.700)	(162.052.700)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.441.029.345</b>	<b>8.521.317.460</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.9	1.441.029.345	8.521.317.460
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.441.029.345</b>	<b>8.521.317.460</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.441.029.345</b>	<b>8.521.317.460</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan Kawasan Komplek Perkantoran PEMDA Pandeglang Cikupa, Jl. Raya Labuan KM.1 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang-Kabupaten Pandeglang.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berkomitmen dengan visi

**"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas."**

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

#### A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%
--------------	--	--	------

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

##### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 Tahun
Gedung dan Bangunan	15 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

#### Piutang Jangka Panjang

##### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

#### Aset Lainnya

##### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.117.267.000	2.225.471.000
Belanja Barang	750.488.000	4.988.300.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.867.753.000</b>	<b>7.213.771.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp219.565.696

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp219.565.696 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp219.565.696. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	219.565.696	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>219.565.696</b>	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 24,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	219.565.696	290.973.258	(24,54)
<b>Jumlah</b>	<b>219.565.696</b>	<b>290.973.258</b>	<b>(24,54)</b>

Realisasi  
Penerimaan Pajak  
Rp0

**B.1.1 Penerimaan Pajak**

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2021 sebesar 0,00 dari TA 2020. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi  
Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
Rp219.565.696

**B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp219.565.696 dan Rp290.973.258. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 24,54 dari TA 2020.

Penyajian PNBSP periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 senilai Rp. 219.565.696 merupakan pendapatan yang berasal dari :

1. Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 81.419.000  
Penyetoran ke kas negara atas kelebihan honor pokja dengan nomor NTPN 29F787QLTTBF0PSC tanggal 22 Juni 2021 dan NTPN D7A9155DEDEJ58FKN tanggal 13 Juli 2021 atas hasil Pemeriksaan Inspektorat Utama KPU RI
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 138.138.888  
Lelang surat suara ex Pilkada 2020 (630 kg), Kotak suara kardus ex. Pilkada 2020 (3.365 kg) dan Bilik suara kardus ex. Pilkada 2020 dengan risalah lelang nomor 535/22/2021 tanggal 8 Desember 2021 dengan bukti setor
3. Pendapatan jasa lembaga Keuangan (Jasa Giro) senilai 7.808 dan sudah dilakukan setor dengan nomor NTPN 997473606626

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	219.565.696	290.973.258	(24,54)
<b>Jumlah</b>	<b>219.565.696</b>	<b>290.973.258</b>	<b>(24,54)</b>

Sedangkan Rincian PNBSP Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNBSP Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	81.419.000	14.397.500	465,51
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	138.138.888	276.575.758	(50,05)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7.808	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>219.565.696</b>	<b>290.973.258</b>	<b>(24,54)</b>

Realisasi Belanja  
Rp7.185.964.573

**B.2 Belanja**

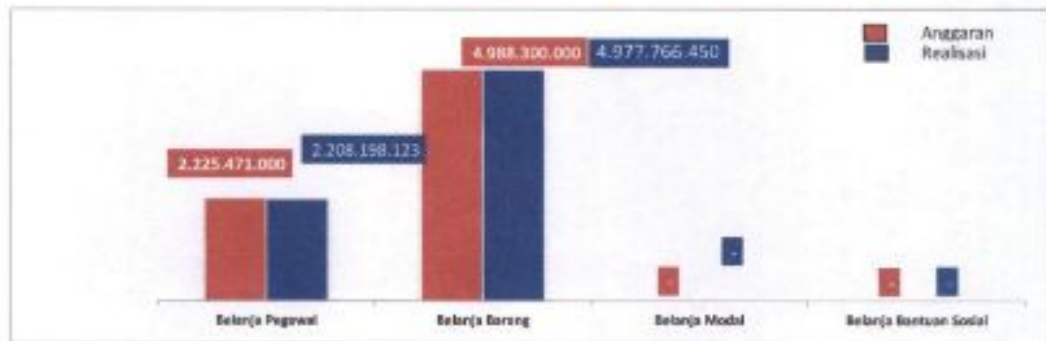
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp7.185.964.573 atau 99,61 % dari anggaran belanja sebesar Rp.7.213.771.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.225.471.000	2.208.198.123	99,22
Belanja Barang	4.988.300.000	4.977.766.450	99,79
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.213.771.000</b>	<b>7.185.964.573</b>	<b>99,61</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 90,76% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	2.208.198.123	2.069.633.850	6,70
Belanja Barang	4.977.766.450	75.637.023.895	(93,42)
Belanja Modal	-	58.800.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.185.964.573</b>	<b>77.765.457.745</b>	<b>(90,76)</b>

Realisasi Belanja Pegawai  
Rp2.208.198.123

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.208.198.123 dan Rp2.069.633.850. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,70 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan Kenaikan belanja pegawai dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	512.255.780	450.173.000	13,79
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.679	6.924	54,23
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	40.387.100	40.985.400	(1,46)
Belanja Tunj. Anak PNS	15.777.944	14.629.376	7,85
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.340.000	45.720.000	3,54
Belanja Tunj. PPh PNS	390.400	224.950	73,55
Belanja Tunj. Beras PNS	38.468.900	32.951.100	18,78
Belanja Uang Makan PNS	125.672.000	113.385.050	10,84
Belanja Tunjangan Umum PNS	17.710.000	15.305.000	15,71
Belanja Uang Lembur	38.545.250	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.370.640.480	1.356.253.050	1,06
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>2.208.198.533</b>	<b>2.069.633.850</b>	<b>6,70</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	410	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.208.198.123</b>	<b>2.069.633.850</b>	<b>6,70</b>

Realisasi Belanja Barang  
Rp4.977.766.450

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.977.766.450 dan Rp75.637.023.895. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 93,42% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja barang di tahun 2021 semester 2 dikarenakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sudah selesai dibulan maret tahun 2021

## Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	363.820.100	11.625.704.174	(96,87)
Belanja Barang Non Operasional	3.895.934.700	56.128.233.263	(93,06)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	113.658.850	2.967.845.395	(96,17)
Belanja Jasa	173.092.600	2.455.683.800	(92,95)
Belanja Pemeliharaan	102.725.350	97.028.500	5,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	328.534.850	2.529.574.500	(87,01)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.977.766.450</b>	<b>75.803.869.632</b>	<b>(93,43)</b>
Pengembalian Belanja	-	166.845.737	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.977.766.450</b>	<b>75.637.023.895</b>	<b>(93,42)</b>

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp22.960.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp17.760.000 dengan rincian sebagai berikut :

## Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan	12.750.000	12.720.000	99,76
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	3.000.000	3.000.000	100,00
Belanja Barang Persediaan - Penanganan	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7.210.000	2.040.000	28,29
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>22.960.000</b>	<b>17.760.000</b>	<b>77,35</b>

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa pembelian APD (Masker, tisu, handsanitizer, Disinfektan, Sabun cuci tangan)
2. Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa pembelian APD (Masker, tisu, handsanitizer, Disinfektan, Sabun cuci tangan)
3. Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 belanja Jasa berupa (Swab, Rafid test Antigen Pegawai)

Realisasi Belanja Modal Rp0

**B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp58.800.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penyajian Nilai Belanja Modal sebesar Rp0,00 tidak ada belanja modal di semester II tahun 2021 baik dari dana APBN maupun Hibah Pilkada.

## Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	58.800.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>58.800.000</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>58.800.000</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

**B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp58.800.000, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. perbandingan realisasi belanja modal sebagai berikut:

## Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	58.800.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>58.800.000</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>58.800.000</b>	<b>(100,00)</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:



Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Rekening Mandiri	-	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

0

Rp0

Saldo per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

**C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.644.454.587. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Sisa Hibah Tahun 2020	-	6.644.454.587,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6.644.454.587</b>

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Sisa Hibah Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pandeglang Sudad di SP4HL kan di tahun anggaran 2021

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

**C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. rincian belanja dibayar dimuka sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penyajian nilai Belanja dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp0,00, sewa Gudang dengan nilai kontrak 1 tahun Rp80.500.000,00 telah selesai di Bulan Desember 2021

Persediaan Rp0

**C.4 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp259.345.828. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Persediaan Lainnya	-	259.345.828
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>259.345.828</b>

Mutasi kurang persediaan terjadi karena adanya pemindahtanganan barang persediaan melalui proses lelang oleh KPKNL serang, dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik (Stock Opname) bertempat di gudang KPU Kabupaten Pandeglang dengan Berita Acara nomor 03/BAStok-Opname/P-Sedia/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021

Tanah Rp0

**C.5 Tanah**

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tanah yang ditempati oleh KPU Kabupaten Pandeglang saat ini adalah tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang.

Peralatan dan Mesin Rp3.918.547.440

**C.6 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp3.918.547.440 dan Rp3.586.303.040. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.918.547.440 sudah dilakukan Pemeriksaan fisik (Stock Opname) dengan Berita Acara nomor: 04/BAStok-Opname/BMN/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 adapun rincian peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Alat Angkutan Darat Bermotor;

Saldo Alat Angkutan pada laporan barang kuasa pengguna Semester II tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.330.606.500,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua enam ratus lima puluh lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Alat angkutan darat bermotor roda empat 12 unit dan roda dua 10 unit dengan total jumlah barang sebanyak 22 unit.

2. Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada laporan barang kuasa pengguna semester II tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 442.039.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

3. Komputer unit

Saldo komputer unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester II tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.145.901.940,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah ). mutasi sebesar Rp. 0,- (nol), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Gedung dan Bangunan Rp0

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Gedung kantor KPU Kabupaten Pandeglang masih berstatus pinjam pakai milik Pemda Kabupaten Pandeglang dengan nomor perjanjian 011/1582UmV/2016

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.477.518.095

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp2.477.518.095 dan Rp1.968.785.995. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.918.547.440	(2.477.518.095)	1.441.029.345
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.918.547.440</b>	<b>(2.477.518.095)</b>	<b>1.441.029.345</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain Rp162.052.700

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp162.052.700 dan Rp162.052.700. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas sebagai berikut:

No	Urutan	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	Mesin Kecil Elektronik/Elektrik	Buah	1	1.560.000
2	Kursi Besi/ Metal	Buah	12	5.100.000
3	Kursi Fiber Glas / Plastik	Buah	5	2.875.000
4	Dispenser	Buah	1	450.000
5	Handy Cam	Buah	1	5.000.000
6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	11	10.490.000
7	Camera Digital	Buah	1	3.850.000
8	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	4	3.814.800
9	P.C Unit	Buah	8	88.820.000
10	Note Book	Buah	2	25.500.000
11	Printer ( Peralatan Personal Komputer )	Buah	4	13.172.700
12	Scanner ( Peralatan Personal Komputer )	Buah	1	24.750.000
13	Hub	Buah	1	485.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 162.052.700

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp162.052.700 dan Rp162.052.700. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	162.052.700	(162.052.700)	-
<b>Total</b>	<b>162.052.700</b>	<b>(162.052.700)</b>	<b>-</b>

Ekuitas Rp1.441.029.345

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.441.029.345, dan Rp8.521.317.460. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan  
Perpajakan Rp0

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

##### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp7.808

##### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp7.808 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa	7.808	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.808,00</b>	-	-

Beban Pegawai  
Rp2.208.198.123

##### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 6,70 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan belanja pegawai dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	512.255.780	450.173.000	13,79
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.269	6.924	48,31
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40.387.100	40.985.400	(1,46)
Beban Tunj. Anak PNS	15.777.944	14.629.376	7,85
Beban Tunj. Struktural PNS	47.340.000	45.720.000	3,54
Beban Tunj. PPh PNS	390.400	224.950	73,55
Beban Tunj. Beras PNS	39.468.900	32.951.100	19,78
Beban Uang Makan PNS	125.672.000	113.385.050	10,84
Beban Tunjangan Umum PNS	17.710.000	15.305.000	15,71
Beban Uang Lembur	38.545.250	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.370.640.480	1.356.253.050	1,06
<b>Jumlah</b>	<b>2.208.198.123</b>	<b>2.069.633.850</b>	<b>6,70</b>

Beban Persediaan  
Rp113.658.850

##### D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 96,17 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Pada tahun anggaran 2020 terdapat realisasi belanja persediaan yang bersumber dari dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan	113.658.850	2.967.645.395	(96,17)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>113.658.850,00</b>	<b>2.967.645.395</b>	<b>(96,17)</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp4.432.847.400

##### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 93,67 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Pada Tahun 2020 terdapat realisasi belanja Barang dan jasa yang bersumber dari anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	215.552.100	195.870.000	10,05
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.680.000	180.243.900	(30,83)
Beban Barang Operasional Lainnya	10.868.000	13.889.000	(21,75)
Beban Barang Operasional - Penanganan	12.720.000	11.203.205.537	(99,89)
Beban Bahan	41.068.000	339.391.300	(87,80)
Beban Honor Output Kegiatan	2.956.650.000	34.967.360.000	(91,54)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	895.218.700	20.821.481.963	(95,70)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan	3.000.000	-	-
Beban Langganan Listrik	29.163.200	28.617.900	1,81
Beban Langganan Telepon	270.600	315.900	(14,34)
Beban Sewa	85.000.000	80.500.000	5,59
Beban Jasa Profesi	10.800.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	45.818.800	4.000.000	1.045,47
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.040.000	2.207.900.000	(99,91)
<b>Jumlah</b>	<b>4.432.847.400</b>	<b>70.042.775.500,00</b>	<b>(93,67)</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp102.725.350

**D.6 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp102.725.350 dan Rp97.028.500.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,87 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait perawatan kendaraan dinas Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.388.000	18.015.500	(25,69)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.337.350	79.013.000	13,07
<b>Jumlah</b>	<b>102.725.350</b>	<b>97.028.500</b>	<b>5,87</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp328.534.850

**D.7 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 87,01 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	328.534.850	2.529.274.500	(87,01)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	300.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>328.534.850,00</b>	<b>2.529.574.500</b>	<b>(87,01)</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp508.732.100

**D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	508.732.100	467.274.650	8,87
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>508.732.100</b>	<b>467.274.650</b>	<b>8,87</b>
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>508.732.100</b>	<b>467.274.650</b>	<b>8,87</b>

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar  
Rp138.138.888

**D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	138.138.888	276.575.758,00	(50)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>138.138.888,00</b>	<b>276.575.758</b>	<b>(50)</b>

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

#### D.10 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp154.317.572

#### D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp154.317.572 dan Rp14.397.500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun	81.419.000	14.397.500,00	485,51
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	332.244.400	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>154.317.572,00</b>	<b>14.397.500</b>	<b>971,84</b>

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.12 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester II 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp8.521.317.460,00

#### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.521.317.460,00 dan

Defisit LO Rp - 7.402.232.405,00

#### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-7.402.232.405,00 dan Rp.-77.882.959.137,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

#### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp - 2.423.769.787

#### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.423.769.787 dan Rp.-27.504.687 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp0,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-27.504.687. Koreksi Atas

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih Revaluasi  
Aset Rp.0,00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

##### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp-2.423.769.787

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.423.769.787 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi bersumber dari kurang cermatnya dalam memilih akun tahun anggaran pada saat pembuatan SPM SP4HI anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

##### Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(2.423.769.787)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.423.769.787)</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp2.745.714.077

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.745.714.077 dan Rp.83.639.886.729. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.965.279.773
Diterima dari Entitas Lain	(219.565.696)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.745.714.077</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 2.965.279.773, sedangkan DDEL sebesar Rp 219.565.696

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

**E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang	Uang	6.644.454.587
<b>Total Pengesahan</b>		<b>6.644.454.587,00</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah	Uang	2.423.769.787,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.220.684.800</b>

Tahun 2021 pengesahan sisa hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, pada bulan Maret 2021 telah di SP2HL kan sebesar Rp. 4.220.684.800 dan di Sisa Hibah tersebut disetorkan ke kas Daerah sebesar Rp. 2.423.769.787. Bukti setor, SP2HL dan SP4HL terlampir.

Ekuitas Akhir  
Rp1.441.029.345

**E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.441.029.345,00 dan Rp.8.521.317.460,00.

**E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas**

**F. Pengungkapan Penting Lainnya**

**F.1 Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan

**F.2 Pengungkapan Lain-Lain**